



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **PRIYANTO HARTO NUGROHO**
2. Jabatan : **AUDITOR MUDA**
3. NHK : **878122**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.991.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/300 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, Rp. 3.015.000.000
2. Tanah Seluas 272 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, Rp. 816.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 309 m2/309 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, Rp. 927.000.000
4. Tanah Seluas 466 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, Rp. 233.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 84.800.000**

1. MOBIL, ISUZU TBR 541/ ST.WAGON Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO AT Tahun 2008, WARISAN Rp. 5.800.000
3. MOTOR, HONDA NCK1A2CB A/T Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOTOR, HONDA L1F02N36LIA/T Tahun 2023, LAINNYA Rp. 19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 75.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 9.264.796**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**



Sub Total	Rp.	5.160.064.796
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.160.064.796

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.